

**MEMBANGUN BANGSA DAN AGAMA: HISTORISITAS
KEPAHLAWANAN SYEKH SULAIMAN AR-RASULI
(1871-1970)***

Oleh
Nopriyasman**

A. Pengantar

Tokoh dan ketokohan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli (1871-1970) dapat ditelusuri dari perbuatan historis yang dilakukannya. Ia hadir lewat sejarah sebagai “orang besar” Minangkabau - sebagaimana tokoh “besar” lainnya yang sezaman. Kiprah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli kelahiran Candung, Agam, ini terlihat dalam varian perjuangan ulama-ulama Minangkabau dalam memperbaharui masyarakat Islam.¹ Para ulama itu dalam hidup dan perjuangannya ada yang memfokuskan diri pada usaha dakwah, memberantas kurafat dan bid’ah melalui pengajian-pengajian di surau sekali seminggu, atau berkeliling ke nagari-nagari. Ulama lainnya memfokuskan diri dengan cara mengajar di surau atau madrasahnyanya. Sejarah juga mencatat, bahwa para tokoh ulama besar Minangkabau melakukan pembimbingan kepada masyarakat tidak saja pada persoalan kehidupan beragama, yang tidak kalah pentingnya adalah

* Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Kepahlawanan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli”, di Aula DPRD Propinsi Sumatera Barat, pada hari Sabtu, tanggal 3 Maret 2018.

****Dr. Nopriyasman, M.Hum** adalah Dosen Jurusan Sejarah (S1) dan Ketua Program Studi Magister Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas, Padang. Mobile: 081363486422, e-mail: nopriyasman@yahoo.com

¹Beberapa ulama sezaman dengan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli adalah Haji Abdullatif Syakur IV Angkat, Syekh Muhammad Jamil Jambek Bukittinggi, Syekh Ladang Lawas, Haji Abdul Karim Amarullah, Haji Abdullah Ahmad Padang, Haji Abdullatif Pahambatan Bukittinggi, Syekh Abbas Abdullah Padang Jepang, dan Syekh Muhammad Jamil Jaho Padangpanjang. Syekh Muhammad Thaib Umar di Sungayang Batusangkar, dan Syekh Ibrahim Musa di Parabek Bukittinggi. Tokoh-tokoh besar ulama Minangkabau ini sama-sama pernah berguru kepada Syekh Ahmad Khatib, yang juga orang Minangkabau yang pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 menjadi Mufti dalam Mashab Syafii di Masjidil Haram, Mekah. Kementrian Penerangan R.I., *Republik Indonesia Propinsi Sumatera Tengah* (Bukittinggi: Kementrian Penerangan R.I., 1954), hlm. 866

dalam hal perjuangan kemerdekaan bangsa dan tanah air. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dikenal sebagai seorang ulama, pendidik, politisi, dan pendiri Perti (Persatuan Tarbyah Islamiyah). Pelekatan berbagai sebutan gelar ini berakar pada pengalaman sejarah yang kemudian menjadi identitas personalnya, lebih luas lagi menjadi identitas kolektif. Hal itu juga berarti, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli tidak saja hasil produk sejarah, tetapi ia hadir lewat sejarah yang diciptakannya.

Kiprah dan peran tokoh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sebenarnya sudah diakui oleh pemerintah. Buktinya adalah pengakuan kepada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sebagai salah seorang perintis kemerdekaan (1969). Gubernur Sumatera Barat pun pada tahun 1975 memberikan penghargaan kepadanya sebagai “Ulama Pendidik”. Di samping itu, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli adalah seorang pemimpin yang dinilai berhasil menjadikan dirinya patut sebagai suri-teladan atau simbol muatan moral bagi keberlanjutan hidup bermasyarakat, tidak saja di Sumatera Barat, pengaruhnya tersebar pada tingkat nasional. Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Candung yang didirikannya pun merupakan poros dari berbagai MTI-MTI di Nusantara. Pemerintah Belanda dan Jepang pernah pula memberikan penghargaan “Bintang Perak” dan “Bintang Sakura” kepada tokoh ini.²

Meskipun Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sudah mendapat berbagai “pengakuan”, namun dalam konteks kepahlawanan nasional, atau politik pahlawan nasional, ia baru tercatat dan masuk dalam kategori orang berjasa. Untuk mencapai gelar pahlawan nasional masih ada beberapa langkah yang harus diikuti dan dipenuhi persyaratannya, termasuk kelengkapan administrasi. Salah satunya adalah “seminar usulan calon pahlawan nasional”. Seminar ini tentu dimaksudkan untuk menuju ke sana, yaitu naiknya level tingkat penghargaan dari level orang berjasa menjadi level pahlawan nasional. Penting didiskusikan dalam kesempatan ini adalah mengapa Syekh Sulaiman Ar-Rasuli layak atau penting dihadirkan sebagai pahlawan nasional ? Bagaimana kiprah dan peran-peran sejarah yang dijalani oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ? Sebelum sampai ke diskusi tersebut, uraian berikut

²M. Sanusi Latief (Eds.), *Riwayat Hidup dan Perjuangan 20 Ulama Besar Sumatera Barat* (Padang: Islamic Centre Sumatera Barat, 1981), hlm. 84.

mencoba mengupas terlebih dahulu situasi dan kondisi penerima gelar pahlawan nasional di Indonesia, khususnya Minangkabau/Sumatera Barat.

B. Pahlawan Nasional: Perhatian dan Penghargaan Kepada Anak Bangsa

Bila disimak dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (KBBI), kata pahlawan mempunyai arti pejuang yang gagah berani; orang yang menonjol karena keberaniannya membela kebenaran. Kepahlawanan memuat unsur-unsur, seperti keberanian, keperkasaan, dan kerelaan berkorban, dari seorang tokoh.³ Bagaimanapun, sejarah dibentuk oleh individu-individu cemerlang, orang-orang jenius dan punya prinsip, atau dikenal juga dengan sebutan pahlawan tersebut. Para individu itu memberi inspirasi kehidupan, dan sering sebagai tokoh panutan, sehingga masyarakat memujanya sebagai pahlawan. Dalam perspektif sosial budaya, pahlawan merupakan simbol yang menjadi keteladanan atau menjadi personifikasi nilai yang patut dicontoh oleh masyarakat.⁴

Secara politik kepahlawanan, hadirnya pahlawan yang mendapat anugerah dari pemerintah, sekaligus menunjukkan citra masyarakat, citra daerah atau tanah kelahirannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada semacam kepentingan yang saling kait-berkait dalam pengajuan perlunya seorang tokoh diusulkan sebagai pahlawan nasional, seperti kepentingan daerah, suku, agama, dan golongan, bahkan keluarga. Meskipun demikian, yang perlu diperhatikan adalah soal pesan atau misi sejarah yang hendak disampaikan terkait dengan pengajuan itu. Apalagi kemunculan pahlawan diperlukan sebagai bukti kiprah dan peran daerah-daerah yang memiliki tokoh yang telah berbuat dan bermanfaat bagi perjuangan dan tetap tegak kokohnya sebuah bangsa. Menteri Sosial (Khofifah Indar Parawansah, 2015) dan para cendekiawan, pemerhati sosial, budaya, dan sejarawan telah pula bersuara lantang agar tokoh-tokoh pejuang pendidikan, pemikir lewat tulisan, tokoh lintas etnik dan agama, pejuang kemanusiaan, tokoh peneguh integrasi bangsa, aktivis politik (praktis), diplomat, dan lain-lainnya mendapat tempat besar pula untuk diusulkan sebagai pahlawan nasional.

³*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 636

⁴Taufik Abdullah, “Pahlawan dalam Perspektif Sejarah”, dalam *Majalah Prisma*. No. 7 (Jakarta: 1976), hlm. 59

Dalam peraturan perundangan, seseorang dapat diusulkan menjadi pahlawan nasional bila sudah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang. Ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 menyebutkan figur yang dapat diusulkan menjadi pahlawan mestilah memenuhi persyaratan secara umum⁵ dan khusus,⁶ yang mempunyai integritas tinggi dalam berkarya dan mengabdikan dirinya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perdebatan yang sering muncul dalam pengajuan seorang tokoh adalah soal level kepahlawanannya, pada tingkat nasional, atau hanya bersifat lokal. Dalam praktik yang terjadi selama ini, tokoh yang lebih tepat sebagai pahlawan lokal, dan hanya berperan singkat, dalam beberapa kasus tetap saja diakui pemerintah sebagai pahlawan nasional. Sebut saja misalnya Pong Tiku dari Toraja dan Chritina Maria Tiahahu.⁷ Fakta historis ini berarti bahwa untuk bisa masuk dalam lembaran pelita sejarah melalui anugerah gelar pahlawan nasional, terkadang pemerintah memasukkan pertimbangan lain, misalnya soal keterwakilan dan pemerataan di berbagai daerah nusantara.

Sekarangnya sejak tahun 1959 hingga tahun 2015, sudah tercatat 168 orang yang diangkat pemerintah sebagai pahlawan nasional. Taufik Abdullah menyebutkan para penerima gelar pahlawan nasional di Indonesia, ada yang yang sejak awal merupakan representasi dari komunitas nasional, dan ada juga yang

⁵Persyaratan umum (Pasal 25, Undang-Undang No. 20 tahun 2009) adalah “WNI (Warga Negara Republik Indonesia) atau seorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia); memiliki integritas moral dan keteladanan; berkelakuan baik; setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan tidak pernah dipenjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

⁶Persyaratan khusus tercantum pada pasal 26, Undang-Undang No. 20 Tahun 2009, yaitu: “pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa; tidak pernah penyerah pada musuh dalam perjuangan; melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya; pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara; pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa; memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi; dan atau melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional”.

⁷Aswiwarman Adam, “Pertimbangan Pahlawan nasional”, *Makalah* (Bukittinggi: Pemda Kabupaten Agam, 11-12 Maret 2016), hlm. 3

menjadi utusan daerah dalam album nasional.⁸ Penerima terbesarnya ada pada kelompok perjuangan bersenjata, kekuatan fisik, atau bersifat sejarah perang atau operasi militer. Penerima gelar pahlawan Nasional di luar kelompok itu, seperti “aktivis kemerdekaan”, “politisi”, “tokoh agama”, “pejuang kaum perempuan”, tokoh integrasi bangsa”, “budayawan”, “penulis”, “pendidik”, “diplomat”, dan sebagainya tergolong sangat sedikit.⁹ Oleh sebab itu, sudah selayaknya tokoh yang berasal dari berbagai kelompok di luar militer mendapat tempat yang sama pula untuk dimunculkan sebagai pahlawan-pahlawan nasional. Pengajuan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dapat dipandang sebagai upaya, agar “kuota” penerima gelar pahlawan nasional semakin berimbang, termasuk juga tokoh perempuan, pencalonan ulama dan tokoh adat lainnya. Pengajuan seorang tokoh harus memperhitungkan tingkat peluangnya.

Karakter kepahlawanan orang Minangkabau, dalam realitas sejarah kemerdekaan bangsa dan pengisian kemerdekaan memang lebih tersohor bukan di bidang kekerasan, tetapi justru di ranah non-militer. Hal ini tercermin pada 15 tokoh Minangkabau yang telah menerima gelar pahlawan nasional. Dari 15 tokoh tersebut, kecuali Tuanku Imam Bonjol, maka penerima gelar pahlawan Nasional dari Sumatera Barat lebih dikenal dalam kepiawaiannya berjuang secara “moderen”. Artinya, para pahlawan nasional merupakan orang yang mempunyai multi-talenta dalam berjuang.

Pahlawan Nasional Muhammad Hatta adalah seorang proklamator kemerdekaan, Wakil Presiden RI yang pertama, dan juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Sutan Syahrir dikenal sebagai negarawan besar Indonesia, dan Perdana Menteri Republik Indonesia yang pertama, sedangkan Tan Malaka, dikenal sebagai “Bapak Republik Indonesia”, di samping Muhammad Hatta. Tokoh pahlawan lainnya adalah Mohammad Natsir (negarawan, tokoh besar dunia Islam); Haji Agus Salim (seorang diplomat ulung), Muhammad Yamin

⁸Taufik Abdullah, “Mengenang Tiga Pendekar Bangsa”, *Makalah* (Padang: 21 Desember 2009), hlm. 3

⁹Gusti Asnan pernah mencatat, bahwa dari 168 orang yang dianugerahi gelar pahlawan nasional, sebanyak 68 orang didukung oleh kiprahnya melalui aksi perjuangan bersenjata, aksi perang dan pertempuran. Gusti Asnan, “Pahlawan Nasional, Diplomat, dan Bagindo Dahlan Abdoellah”, *Makalah* (Pariaman: 7 April 2016), hlm. 3.

(negarawan dan cendikiawan penjelajah); Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah (sebagai ulama besar, sastrawan, sejarawan, dan Wartawan); Abdul Halim (dokter ahli THT dan Perdana Menteri), Abdul Muis (berjuang dengan pena, seorang wartawan yang kritis), A.K. Gani (seorang dokter, politisi, dan pejuang yang eksentrik), Bagindo Azis Chan (Walikota Padang), Hazairin (ahli hukum adat, Mendagri), Ilyas Yakub (Politisi, Pendiri Permi), dan Rasuna Said (Pendidik dan Pejuang Wanita).¹⁰

Sesungguhnya ada banyak tokoh berjasa Sumatera Barat yang bisa dinaikkan levelnya lebih lanjut ke tingkat pahlawan nasional. Hasril Chaniago telah menghimpun sebanyak 101 orang Minang di Pentas sejarah dengan keberagaman bidang yang diperankannya, mulai dari negarawan, politisi, ulama, tokoh adat, pendidik, birokrat, militer, diplomat, saudagar, ahli hukum, ahli perminyakan, seniman musik, tokoh perfileman, penari, sastrawan, wartawan, dan sebagainya. Tokoh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli termasuk dalam catatan historis tersebut, dan juga tercatat dalam buku “Kamus Sejarah Minangkabau” (Gusti Asnan); “Riwayat Hidup dan Perjuangan 20 Ulama Besar Sumatera Barat” (M. Sanusi Latief, Eds); buku “Beberapa Ulama di Sumatera Barat (Yulizal Yunus, et.al.). Tokoh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli juga tidak bisa dipisahkan dalam perjalanan sejarah Minangkabau, khususnya yang terkait pada aktivitas keulamaan Minangkabau dalam bidang pendidikan, organisasi sosial, dan politik kepartaian di Sumatera Barat. Karya-karya penulis terdahulu selalu menyebut tokoh ini sebagai salah satu “orang besar” Minangkabau, yang telah memberi warna dalam membangun basis-basis kemasyarakatan yang berguna dalam perjuangan berbangsa dan bernegara. Kiprah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli yang dihadirkan ke pentas sejarah, sekaligus menjadi dasar justifikasi kepahlawanannya, dan salah satu faktor penguat diterimanya oleh pemerintah pengajuan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sebagai Pahlawan Nasional.

¹⁰Penjelasan lebih lanjut tentang ketokohan pahlawan nasional tersebut dapat diikuti dalam Hasril Chaniago, *101 Orang Minangkabau di Pentas Sejarah* (Padang: Yayasan Citra Budaya Indonesia, 2010).

C. Membangun Bangsa dan Agama: Historisitas Kepahlawanan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli

Nama populer dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli adalah “Inyiak Canduang”. Pemanggilan Inyiak menandakan bahwa ia orang besar, sekaligus dituakan dalam berbagai urusan sosial kemasyarakatan. Inyiak canduang berarti ulama besar dari Canduang, suatu nagari yang terletak kira-kira 10 km dari sebelah Timur kota Bukittinggi. Di Canduang inilah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dilahirkan, tepatnya tahun 1871. Terlahir sebagai anak ulama, dari pasangan Angku Muhammad Rasul dan Siti Buli’ah, maka putra Candung ini memiliki kecerdasan spritual dan sosial, yang secara genetik memungkinkan ia mewariskan sifat keulamaan ayahnya.

Spiritualitas Syekh Sulaiman Ar-Rasuli diasah langsung oleh banyak tokoh ulama, mulai dari ulama yang berdomisili di alam Minangkabau sampai ulama yang berdomisili di Mesjidil Haram, Mekah. Beberapa ulama yang pernah menggembleng Syekh Sulaiman Ar-Rasuli adalah Syekh Muhammad Arsyad (Batu hampar), Tuanku Sami’ Ilmiah (di Baso), Tuanku Kolok (di Sungayang, Batusangkar), Syekh Abbussalam (Banuhampu) dan Syekh Abdullah (di Halaban). Ayahnya dan beberapa ulama tersebut dapat dikatakan sebagai pembentuk awal pengetahuan keagamaan putra Candung ini. Proses belajar ilmu agama di daerah Minangkabau dijalannya sampai usia sekitar 32 tahun. Sebelum berangkat ke Mekah (1903), Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sempat mengabdikan ilmu agama yang diterimanya itu beberapa waktu di Kampung halamannya, Candung.¹¹

Pada tahun 1903, Syekh Sulaiman berangkat ke Mekah dan berguru pula pada beberapa ulama terkenal di sana, seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabauwi, Syekh Mukhtar ‘Atharid-as-Shufi, Sayyid Ahmad Syattha al-Makki, Syekh Usman as-Sarawaki, dan Syekh Muhammad Sa’id Ba Bashil Mufti Syafi’i. Di Mekah ini, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mendapat berbagai ilmu seperti

¹¹Diramu dari beberapa sumber, antara lain: Yulizal Yunus, et.al., *Beberapa Ulama di Sumatera Barat* (Padang: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pariwisata Seni dan Budaya, UPTD Museum Adityawarman, 2008); M. Sanusi Latief (Eds.), *Riwayat Hidup dan Perjuangan 20 Ulama Besar Sumatera Barat* (Padang: Islamic Centre Sumatera Barat, 1981); Gusti Asnan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat bahasa, 2008); dan Hasril Chaniago, *101 Orang Minangkabau di Pentas Sejarah* (Padang: Yayasan Citra Budaya Indonesia, 2010).

ilmu ‘Arabiyah (Ilmu Alat), Fiqih, Tafsir, Hadist, Tassawuf, dan lain sebagainya. Proses pematangan ini ditempuhnya selama kurang lebih tiga setengah tahun atau sampai tahun 1907.¹²

Sebagaimana ulama lainnya, gelar Haji dan kelengkapan pengetahuan keagamaannya menyebabkan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli semakin dihargai dan petuah keagamaannya mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat Minangkabau. Sekembali dari Mekah ini pula, kiprah dari seorang putra Candung ini semakin nyata. Pada tahun 1917, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dipercaya untuk membenahi berbagai kekeliruan dalam pelaksanaan nikah, talak, dan rujuk, yang dilakukan oleh para Qadhi. Untuk menghindari kekeliruan, maka Qadhi di daerah Candung dijabat oleh orang yang mengetahui agama Islam, dan yang diminta untuk menjadi Tuan Qadhi tersebut adalah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Setahun kemudian (1918), Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dipercaya pula memimpin Serikat Islam (SI) untuk anak Cabang Baso, Kabupaten Agam.¹³

Dalam dunia pendidikan, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mereformasi sistem pendidikan surau dari metode *halaqah* menjadi sistem kelas atau model sekolahan. Hal itu dapat diartikan bahwa, seorang Syekh Sulaiman Ar-Rasuli adalah reformis pendidikan, dengan materi ajaran sudah dikembangkan sedemikian rupa, mulai dari ilmu alat (nahu, syaraf, balaqah, badi’, ilmu hadist, ilmu qur’an, dan mantiq) sampai ilmu terapan seperti tafsir, akhlak, fiqih, dan tauhid. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mengajarkan bermacam-macam ilmu agama itu dengan menggunakan jadwal pelajaran yang teratur. Sejak saat itu, maka pelajaran agama yang diterima para murid sudah dapat diukur dan ditentukan tahun tamatnya.

Dari suraunya, yang dikenal dengan Surau Baru,¹⁴ pengaruh faham keagamaan dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mulai meluas ke berbagai nagari Minangkabau. Pelekatan panggilan “Inyiak Candung” semakin familier dan

¹²*Ibid.*

¹³M. Sanusi Latief (Eds.), *Ibid.*, hlm. 81-82; Yulizal Yunus, et.al., *Ibid.*, hlm., 2-3

¹⁴Surau tempat ayahnya mengajar disebut “Surau Tengah”, sedangkan surau tempat Abangnya mengajar disebut “Surau Atas”. Surau Baru sendiri dibuatkan oleh penduduk Candung, untuk tempat Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mengajarkan Ilmu Agama. M. Sanusi Latief (Eds.), *Riwayat Hidup dan Perjuangan 20 Ulama Besar Sumatera Barat* (Padang: Islamic Centre Sumatera Barat, 1981), hlm. 77

populer di tengah masyarakat Minangkabau. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mengubah susunan sekolahnya dengan memakai kelas, setelah bermusyawarah dengan para ulama di Candung, khususnya dari ulama yang dikenal dengan kelompok kaum tua pada bulan Mei tahun 1928. Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Candung merupakan Madrasah Tarbiyah tertua. Setelah itu menyusul berdiri MTI di Jaho (Muhammad Jamil Jaho); MTI Tabek Gadang Payakumbuh (Syekh Abdul Wahid Shaleh). Ketiga madrasah ini menjadi MTI “tiga serangkai” yang saling bekerjasama membangun pendidikan anak nagari, sekaligus mengembangkan paham Ahlul-sunnah. Kemudian barulah berdiri MTI-MTI lainnya yang tersebar ke seluruh Sumatera mulai dari Aceh sampai Lampung, bahkan sampai Sintang (Kalimantan Barat).¹⁵

Pada tahun 1928 itu juga, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli bersama Kaum Tua dan dua sahabatnya, Syekh Abbas Ladang Lawas dan Syekh Muhammad Jamil Jaho membentuk organisasi sekolah-sekolah agama yang bernama At-Tarbiyah, yang pada tahun 1930 menjelma menjadi organisasi bernama Persatuan Tarbiyah Islamiyah (disingkat Perti). Organisasi Perti dipimpin oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli.¹⁶ Semua sekolah yang berafiliasi ke Perti dinamakan Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI), dan menjadi sebuah usaha perkumpulan. Pembentukan organisasi ini, bagaimanapun tidak terlepas dari adanya persaingan Kaum Tua dan Kaum Muda, yang juga mengembangkan sekolah seperti Madrasah Diniyah, dan Sekolah Thawalib.

Secara historis, kesan yang lahir dari keberadaan dan aktivitas perjuangan kaum agama di Sumatera Barat adalah (1) surau/madrasah berada dalam dua

¹⁵Pada tahun 1979 terdapat sekitar 216 MTI di Sumatera Barat. Pada tahun 1969 berdiri Fakultas Tarbiyah, Ahlul-sunnah di Bukittinggi yang dipimpin oleh H. Ma'ana Hasnuti, M.A. Lihat M.Sanusi Latief (Eds.), *Ibid.*, hlm. 79; Sedangkan Hasril Chaniago menyebutkan, bahwa pada tahun 1942 tercatat sekitar 300 sekolah Perti, dengan jumlah murid sekitar 45.000. Hasril Chaniago, *Op.cit.*, hlm. 474

¹⁶Pada masa revolusi kemerdekaan, tepatnya tahun 1946 organisasi sosial keagamaan Perti menjadi Partai Politik Perti. Perubahan ini tampaknya mengikuti suasana dan gejala revolusi. Pada tahun 1969 (awal Orde baru), Partai Perti terpecah dua, yaitu Perti yang bergerak di sosial keagamaan, dan Perti sebagai Partai Politik. Perpecahan ini tentu saja mengecewakan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sebagai pendiri Perti. Seiring dengan penambahan umurnya hampir 90 tahu, maka Syekh Sulaiman Ar-Rasuli lebih tinggal di Candung dan tetap mengasuh pesantren Tarbiyah Islamiyah hingga beliau wafat pada 1 Agustus 1970. Kementerian Penerangan R.I., *Op.cit.*, hlm. 876; dan M. Sanusi Latief (Eds.), *Ibid.*, hlm., 79 dan 84

aliran besar yang masing-masingnya mendapat pengikut dan pembelaan dari kalangan ulama, dan rakyat banyak; (2) madrasah sealiran merapat; (3) pengaruh madrasah semakin mendalam kepada masyarakat; (4) masing-masing madrasah berkompetisi menuju kemajuan; dan (5) timbulnya kemerdekaan berpikir dan keinginan melakukan penyelidikan dalam lingkungan madrasah dan juga dalam bidang sosial kemasyarakatan.¹⁷

Syekh Sulaiman Ar-Rasuli seringkali berbeda pendapat dengan kaum Muda. Ia tidak bisa menerima paham pembaharuan yang berasal dari Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Hamka menggambarkan, bahwa antara Syekh Abdul Karim Amrullah dengan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sebenarnya mempunyai pandangan yang sama soal harta pusaka Minangkabau, yang dinilai mereka hanyalah harta “*musabalah*”, yang akan berubah sendiri sesuai perkembangan zaman, namun harta pencaharian hendaklah dibagi menurut hukum faraid. Perselihan mereka hanyalah soal Thariqat Nagsyabandiyah yang dibela Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, yang tidak disukai oleh Syekh Abdulkarim Amrullah dan Syekh Jambek.¹⁸

Persoalan tarikat, masalah ussalli, masalah yang berkaitan dengan meniga, menujuh, menyeratus hari, dan beberapa kebiasaan atau masalah khilafiah lainnya, memang sejak tahun 1904 sudah menjadi ajang pertukaran pikiran dan perbantahan di Minangkabau. Para ulama terbagi dalam dua aliran besar, yaitu aliran muda dan aliran tua. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli¹⁹ menentukan pendiriannya dalam aliran tua atau kaum tua. Sejak saat itu, lahirlah dua corak pengajian. Kaum Tua mempertahankan kebiasaan-kebiasaan keagamaan yang berlaku dalam masyarakat, sedangkan Kaum Muda,²⁰ menghendaki evaluasi kembali dalam berbagai macam hal kemasyarakatan dan keagamaan.

¹⁷Kementrian Penerangan, *Op.cit.*, hlm. 868

¹⁸Hamka, *Ayahku Riwayat Dr. H. Abdul karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera* (Jakarta: Penerbit Umminda, 1982), hlm. 292.

¹⁹Ulama aliran tua di Minangkabau antara lain Syekh Chatib Ali (di Padang), Syekh Abdul Wahab (di Ladang Lawas), dan Syekh Sa’ad di Mungka, Payakumbuh. Kementrian Penerangan R.I., 1954, *Ibid.*, hlm. 868

²⁰Beberapa tokoh ulama kaum muda adalah Haji Abdullah Ahmad (di Padang), Syekh Muhammad Thaib Umar (di Batusangkar), Syekh Abbas dan Syekh Abdul Karim Amrullah (di

Salah satu perdebatan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dengan kaum muda (Syekh Abdul Karim Amrullah) adalah soal Ru'yah. Hamka mengutip perkataan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli berikut ini. “*Bagaimana tuan-tuan Kaum Muda! Kata tuan hendak kembali kepada sunnah, tetapi di dalam hal puasa yang nyata-nyata diperintahkan ru'yah, tuan-tuan kembali menyatakan Ijtihat!*”²¹

Meskipun cara perjuangan yang dilakukan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli berbeda dengan pembaharuan yang dilakukan Kaum Muda, namun tidak menyebabkan mereka berdebat kusir, tetapi justru menyebabkan ulama yang digolongkan ke dalam kelompok Kaum Tua ini makin produktif menuangkan berbagai pikirannya lewat tulisan.²² Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sendiri sangat toleran dan menghargai pendapat orang lain.

Pada dekade kedua abad ke-20, Minangkabau berada dalam suasana puncak aksi pembaharuan. Berbagai sekolah dan organisasi sosial keagamaan semakin banyak di Minangkabau. Dalam kondisi itu, maka Belanda mulai pula melakukan pengawasan Islam, khususnya tentang pendidikan Islam, seperti soal perlunya izin pemerintah, sifat pendidikan, kewajiban membuat daftar murid-murid, pengawasan pejabat, dan lain sebagainya. Dalam Rapat besar ulama di Bukittinggi, pada tanggal 3 Nopember 1928, yang dihadiri kurang lebih 800 orang ulama dan wakil-wakil 115 organisasi, didapat kesepakatan untuk mengirim mosi penolakan terhadap segala bentuk peraturan bagi pembatasan pendidikan agama di Minangkabau. Pengawasan pejabat Belanda tersebut oleh para guru agama di berbagai lembaga pendidikan dianggap sebagai tindakan mengebiri atau membatasi kemerdekaan mereka. Meskipun Syekh Sulaiman Ar-Rasuli tidak menentukan sikap, namun ia menghargai keputusan rapat. Salah satu sumbangan

Padang Panjang). Ketiga tokoh ini mempunyai tempat pengajian. Sementara itu, Syekh Muhammad Djamil Djambek, Syekh Abdul latif Syukur adalah ulama dari Muballig.

²¹Hamka, *Loc.cit.*

²²Beberapa karangan dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli berbicara soal Isra' Mi'raj Nabi, Maulud Nabi, Sejarah Nabi, Tasawwuf, Ilmu Tafsir, Ushuluddin, Do'a-do'a, Perdamaian adat dengan Syarak, Pertalian adat dan syarak, pengangkatan penghulu-penghulu di Minangkabau, dan pembahasan soal Tauhid. Judul-judul karangannya dapat diikuti dalam M. Sanusi Latief (Eds.), *Op.cit.*, hlm., 80-81. Pada tahun 1950-an, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli menjadi salah satu yang mewarnai dinamika pemikiran politik orang Minangkabau, yang menyampaikan pesan-pesan lewat media massa, seperti *Haluan* dan dalam Kongres Alim Ulama Se-Sumatera (1957).

terbesar dari peristiwa itu adalah kesadaran terhadap kekuatan persatuan mereka, dan juga telah membangkitkan perasaan kebangsaan (nasionalisme Indonesia).²³

Semangat persatuan ini dibawa dalam berbagai ceramah keagamaan kepada masyarakat di Mnangkabau, baik dari kaum tua, termasuk yang dilakukan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, maupun kaum muda. Adakalanya *tablig* agama itu dilakukan secara bersama-sama, meskipun aliran ulamanya berbeda. Pernah suatu ketika, dalam satu perjalanan bersama-sama, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Abdul Karim Amrullah dan Syekh Ibrahim Musa berjanji, bahwa mereka “akan sama-sama membawa ummat ini kepada satu tujuan, yaitu persatuan”. Bagi mereka, “pangkal persatuan itu mudah saja, yaitu kerap kali sajalah kita sejalan!”, demikian dinyatakan Hamka.²⁴

Pengobaran semangat persatuan dan berbagai aktivitas Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat tidak pernah berhenti sepanjang hayatnya. Pada masa pendudukan Jepang, organisasi Perti, dan juga Muhammadiyah tetap diizinkan berdiri sebagai organisasi sosial dan pendidikan. Padahal sudah ada Majelis Islam Tinggi (MIT), yang dipandang oleh Jepang sebagai wadah-wadah pemersatu semua organisasi keagamaan di Sumatera Barat. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dipercaya sebagai Ketua MIT tersebut. Realitas ini mengindikasikan, bahwa tetap bertahannya Perti tentu tidak terlepas dari penghargaan Jepang terhadap figur keulamaan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Di samping itu, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli berhasil meyakinkan pihak Jepang, bahwa organisasinya tidak ikut mencampuri urusan politik, termasuk organisasi Muhammadiyah. Kedua organisasi ini akhirnya tetap diizinkan berdiri oleh Jepang, sedangkan MIT yang diketua Syekh Sulaiman Ar-Rasuli lebih berfungsi sebagai badan permusyawaratan para ulama, yang lebih banyak memperbincangkan masalah-masalah perselisihan paham dan pendapat dalam agama Islam.²⁵

²³Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia, 1900-1942* (Jakarta: LP3S, 1980), hlm., 198

²⁴*Ibid.*, hlm. 293

²⁵Kemertian Penerangan R.I., *Op.cit.*, hlm. 458-459

Sementara itu, soal kerlasykaran yang disarankan pembentukannya oleh Jepang kepada pemimpin agama (Ketua umum MIT dan pemimpin adat yang diwakili Dt. Simarajo dari Majelis Tinggi Adat Alam Minangkabau), maka Syekh Sulaiman Ar-Rasuli menyambut baik. Hal ini menunjukkan bahwa Syekh Sulaiman Ar-Rasuli berpikir untuk masa depan bangsa, terbukti kemudian didirikan Lasykar Muslimin oleh Perti dan MTKAAM dengan *Lasykar Hulubalangnya*. Jepang memang tercatat dalam sejarah memberikan latihan dasar militer terhadap banyak pemuda, terlebih sejak diumumkannya pembentukan *Giyugun* (Lasykar Rakyat atau tentara Sukarela) pada tahun 1943. *Giyugun* dan kegiatan latihannya turut memengaruhi sistem latihan-latihan di kelasykaran organisasi sosial keagamaan. *Giyugun* berkembang di Sumatera Barat sebagai kumpulan dari unit-unit lokal yang bebas (independen), sehingga tak kala proklamasi kemerdekaan Indonesia berkumandang, para anggota bekas *Giyugun* ini menjadi pelatih-pelatih “militer” masyarakat nagari dan kota, sehingga memberi pengaruh pada corak dan karakter perjuangan pada zaman kemerdekaan.²⁶

Lasykar Hizbullah diresmikan berdirinya pada 25 Nopember 1945 oleh organisasi Muhammadiyah. Organisasi ini mengakui Masyumi sebagai partai politik Islam. Di samping itu, MIT (Majlis Islam Tinggi) pada tanggal 22 Desember 1945 berubah menjadi partai politik dan mendirikan lasykarnya pada awal Desember 1945 dengan nama Lasykar Sabilillah. Pada bulan Februari 1946, partai MIT berubah menjadi Cabang Masyumi. Lasykar Muslimin Indonesia (disingkat Lasymi) diresmikan bulan Maret 1946 digerakkan oleh Perti. Perti yang juga akhirnya menjadi partai politik muncul sebagai kekuatan politik dan militer, di samping partai Masyumi.²⁷

Perubahan Perti dari organisasi sosial keagamaan menjadi partai Perti merupakan tindak lanjut dari hasil kongres di Bukittinggi pada tanggal 22-24

²⁶Tentang *Giyugun* lihat Audrey Kahin, *Perjuangan Kemerdekaan Sumatera Barat dalam Revolusi Nasional Indonesia 1945-1950*. (Jakarta: Angsana Mamanda-MSI Sumatera Barat, 1997), hlm., 52-62.

²⁷*Ibid.*, hlm. 98; Kementrian Penerangan R.I., *Op.cit.*, hlm. 461-462

Desember 1945.²⁸ Partai politik Islam ini dipimpin oleh putra Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, yaitu H. Siradjuddin Abbas. Partai Perti sekaligus menjadi wadah bagi kaum tua, karena partai MIT kepemimpinannya didominasi oleh kaum muda, seperti Mansyur Daud Dt. Palimo Kayo dan Ilyas Yakub. Perubahan ini disetujui oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dan ia menjadi penasehat tertinggi dari partai Islam Perti. Dalam acara pelantikan Lasymi sebagai lasykar partai Perti pada bulan Maret 1946 di Bukittinggi, sempat dihadiri oleh Menteri Penerangan Natsir dari Kabinet Sjahrir. Sumbangan Lasymi di berbagai medan pertempuran pada masa revolusi di Sumatera tentu saja tidaklah ternilai, baik putra (Lasykar Muslimin Perti) atau pun putrinya (dikenal juga dengan Lasykar Muslimat Perti).²⁹ Lasykar wanita Perti ini bertugas antara lain mengantarkan makanan pejuang, menampung dan mencarikan pemondokan bagi pengungsi, urusan dapur umum, mencari perbekalan, latihan PMI, dan menolong korban perang.

Syekh Sulaiman Ar-Rasuli pada era perang kemerdekaan itu, secara terus menerus memotivasi masyarakat Minangkabau untuk terus berjuang menegakkan republik. Gerakan itu dikenal juga dengan semangat perang sabil. Dalam upaya memobilisasi itu, tidak jarang Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ikut terjun ke berbagai nagari dan memberikan semangat perjuangan di front-front pertempuran, sebagaimana yang juga telah dilakukannya pada masa penjajahan Belanda. Dalam aktivitasnya itu, Lasymi dan lasykar-lasykar lainnya yang tersebar di nagari-nagari sekaligus bertindak sebagai barisan pengawal Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Tampak di sini semangat yang begitu besar dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, untuk tetap berperan dalam memperdalam rasa pertanggung jawaban rakyat terhadap pertahanan negaranya. Padahal usia “Inyiak Candung” pada waktu itu telah melampaui 70 tahun, suatu usia yang tentu tidak muda lagi.

Walaupun secara historis dan faktual para ulama di Minangkabau mempunyai pendirian yang tidak sama, namun dalam soal pembelaan dan pertahanan negara mereka serentak bersatu dan mengambil keputusan yang menjadi pegangan ummat. “Kebulatan tekad” itu dinyatakan para ulama dan

²⁸Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional, 1945-1965* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1987), hlm.174

²⁹Kementrian Penerangan R.I., *Op.cit.*, hlm. 476

mubaligh-mubalig Islam Sumatera Barat pada tanggal 26 Juli 1947, saat mana bangsa Indonesia menghadapi agresi Belanda pertama. Istilah “mobilisasi sabil” dalam perang sabil terhadap musuh Allah dan musuh kita (yaitu Belanda) memompa semangat dan partisipasi sosial-politis-militer masyarakat di seluruh nagari Minangkabau.³⁰ Pada tahun 1947 itu pula Syekh Sulaiman Ar-Rasuli diangkat oleh Menteri Agama RI sebagai Kepala Mahkamah Syariah Provinsi Sumatera Tengah.³¹

Tampaknya usia “senja” tidak menyurutkan semangat Syekh Sulaiman Ar-Rasuli untuk berbuat yang terbaik bagi pendidikan ummat manusia, khususnya masyarakat Minangkabau. Pada tahun 1950-an, dalam suasana aura pergolakan daerah, Inyik terus menyebarluaskan gagasannya bagi pencerahan masyarakat. Berbagai gagasan dari Inyik tersebut dituangkannya dalam media massa Sumatera Barat, misalnya soal keterpaduan adat dan Islam. Gagasannya diterbitkan di harian *Haluan* empat hari berturut-turut, tepatnya dari tanggal 16 April sampai 19 April 1951. Dalam tulisannya yang berjudul “Mari Bersatu dengan Adat dan Syarak”, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli merasa prihatin atas kondisi masyarakat yang terus terbelah akibat berbagai persaingan di antara mereka, sebagai akibat mengabaikan nilai-nilai adat dan agama yang dianutnya. Padahal kedua ajaran itu, adat dan agama, secara historis sudah lama menjadi pedoman hidup orang Minangkabau. Oleh sebab itu, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mengajak masyarakat “marilah kita bersatu padu” dan tidak lagi membenarkan pendapat satu pihak saja. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mengatakan berikut ini.

Hendaklah tiap-tiap kita (baik alim ulama, baik ninik mamak maupun cerdik pandai) mengakui bahwa adat yang sebenarnya dan agama Islam itu tidak dapat dipisahkan dan keduanya mesti bersatu dan akan bertambah kuat pula jika disertakan ilmu pengetahuan moderen (itulah yang politik) menjadi pula “tungku tigo sajarangan” kembali.

³⁰*Ibid.*, hlm. 486-487

³¹Jabatan Kepala Mahkamah Syariah Provinsi Sumatera Tengah dipegang oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli selama 13 tahun. Pada tahun 1960 Syekh Sulaiman Ar-Rasuli pensiun, namun tetap mengasuh pesanteren Tarbiyah Islamiyah Candung. M. Sanusi Latief (Eds.), *Op.cit.*, hlm., 83; Yulizal Yunus, et.al., *Op.cit.*, hlm., 154

Cobalah perhatikan kembali perjanjian-perjanjian orang tua dahulu itu... kalau perjanjian itu kita amalkan, niscaya akan senanglah bumi Alam Minangkabau ini sekarang juga.³²

Pada tahun 1950-an itu, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli gencar melakukan “sosialisasi” mengenai integrasi adat Minangkabau dan syarak (ajaran Islam) dalam setiap kesempatan ceramah dan tulisannya di media massa. Ungkapan “Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah” yang dewasa ini sangat populer merupakan hasil “sosialisasi” dari ulama besar ini dalam berbagai kesempatan sepanjang dasawarsa 1950-an”.³³

Syekh Sulaiman Ar-Rasuli tidak saja sebagai pemimpin agama, pemimpin rakyat, lebih dari itu sumbangsihnya untuk negara dan bangsa baik pemikiran dan tindakannya begitu berharga. Sejak proklamasi, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ikut serta memberikan berbagai masukan atau saran untuk pembenahan aparat pemerintahan Republik Indonesia. Untuk maksud itu, ia pun tergerak mencalonkan diri menjadi anggota Konstituante dalam pemilu tahun 1955 dan terpilih mewakili daerah Sumatera Tengah. Selama menjadi anggota, ciri khas Syekh Sulaiman Ar-Rasuli tidak berubah, bahkan dalam memimpin sidang pertama Konstituante di Bandung tahun 1956, Inyik tetap memakai pakaian yang biasa ia kenakan, yaitu mengenakan sarung dan sorban. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli memimpin sidang pertama Konstituante, karena ia tercatat sebagai anggota paling tua waktu itu.³⁴

Pada tahun 1957, dalam “Siaran Kongres Alim Ulama Se Sumatera”, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli menulis bahwa “Gerakan Daerah Adalah Islah”. Tulisan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mencoba memberi solusi bagi persoalan hubungan daerah dan pusat yang sedang menghangat. Beberapa persoalan krusial yang terjadi di Indonesia dikupas Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, seperti berkembangnya “kemungkar dan kemaksiatan”, tindakan manusia

³²Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, “Mari Bersatu Dengan Adat dan Syarak”, dalam Gusti Asnan (Ed.), *Demokrasi, Otonomi dan Gerakan Daerah Pemikiran Politik Orang Minang Tahun 1950-an* (Padang: Yayasan Citra Budaya Indonesia, 2006), hlm., 160-161

³³Gusti Asnan, *Kamus Sejarah Minangkabau* (Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM), 2003) m hlm., 308

³⁴Hasril Chaniago, *Op.cit.*, hlm., 475

“mencampurkan yang hak dengan yang batil”, dan soal kejujuran yang tidak berharga lagi sehingga “Yang Jujur Terkubur, Yang Curang Senang”. Semua ini menjadi sebab terjadinya perlawanan untuk mengoreksi pusat yang dilakukan daerah.

Dalam memberikan solusi bagi persoalan negara yang berkembang pada tahun 1950-an itu, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli menyorakan (1) “pemimpin negara haruslah dipegang oleh orang yang benar-benar mempunyai jiwa kemasyarakatan”; (2) “segala orang yang telah bersalah terhadap negara jangan dilindungi juga secara pokrol-pokrolan”; (3) “Kejadian-kejadian di daerah sekarang ini janganlah dihukum secara yuridis formil saja, tetapi harus dilihat sebab-sebabnya”; (4) “Untuk pembangunan di daerah haruslah hasil daerah itu ditentukan jumlahnya untuk daerah”; dan (5) “Harus ada hendaknya jaminan daerah ini di pemerintahan pusat, yaitu dengan adanya dewan yang dinamakan senat”.³⁵ Pendirian Syekh Sulaiman Ar-Rasuli pada tahun-tahun “pergolakan” itu, mewarnai berbagai pemikiran politik orang Minangkabau, yang pada umumnya berpihak pada “gerakan daerah” dan supaya pemerintah pusat lebih memerhatikan kepentingan daerah. Sejarah pun mencatat, bahwa berbagai ide dan gagasan orang Minangkabau tahun 1950-an, sebageian besar mulai terwujud pada dewasa ini.

D. Penutup

Historisitas tokoh dan ketokohan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli tentu saja penting untuk diangkat kembali ke “pentas sejarah”, tidak saja berguna bagi Minangkabau, namun juga berguna bagi bangsa Indonesia. Bukankah ungkapan bijak sejarah mengatakan “belajarlah dari sejarah, maka kita menjadi bijaksana”. Oleh sebab itu, catatan pengalaman perjuangan dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ini adalah salah satu mengambil hikma kebijaksanaan dari sejarah, yang perlu dikenang oleh generasi bangsa. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari perjalanan seorang tokoh yang dipanggil Inyik Candung (ulama besar dari Candung), misalnya soal nilai-nilai perjuangan, dan baktinya membangun bangsa dan negara.

³⁵Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, “Gerakan Daerah Adalah Islah” dalam Gusti Asnan (Ed.), *Opcit.*, hlm. 237

Sejarah membuktikan, bahwa organisasi Perti yang didirikan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli (1928) telah menjelma menjadi sebuah organisasi yang mapan dan menjadi rujukan bagi berbagai sekolah agama, tidak saja di Sumatera Barat juga bagi kelembagaan Islam di berbagai daerah nusantara. Meskipun Syekh Sulaiman Ar-Rasuli kini tiada lagi (meninggal 1 Agustus 1970), namun sudah puluhan ribu sumbangsih alumni jebolan Sekolah-Sekolah Perti berjasa untuk bangsa dan negara.

Secara ringkas dapat dikatakan, bahwa melihat rekam jejak perjuangan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, maka tentulah tepat mengusulkan tokoh ini mendapat gelar pahlawan nasional dari pemerintah. Beberapa pertimbangan yang patut mendapat perhatian adalah pertama, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sudah berkontribusi besar sepanjang hidupnya, dan tetap konsisten bahwa memajukan bangsa harus dimulai dari pendidikan anak bangsa. Sumbangsih beliau tidak terbantahkan sejak masa penjajahan Belanda, bahkan Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) binaan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli tetap eksis mengemban misi pendidikannya pada era kemerdekaan ini. Bagi Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, agama Islam adalah pondasi penting dalam upayanya memajukan martabat bangsa.

Kedua, aktivitas politik dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sesungguhnya sudah dimulai sejak masa kolonial, ketika ia menjadi pengurus dan ketua anak cabang dari organisasi Syarikat Islam (SI) di Baso (Agam). Meskipun Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dicatat sejarah sebagai orang yang beraliran “tua”, namun dalam praktik perjuangannya ternyata bersifat moderat, dan mampu bekerjasama dengan ulama-ulama aliran “muda”, dan dapat bahu membahu menggelorakan semangat perjuangan rakyat. Syarikat Islam merupakan salah satu organisasi politik yang turut membidani kebangkitan nasionalisme Indonesia, dan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli pun ikut terjun menjadi pemimpin di anak cabang organisasi itu.

Ketiga, pada masa revolusi, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli banyak memberi masukan bagi pembenahan pemerintahan dan strategi-strategi berhadapan dengan Belanda. Perti yang dahulunya organisasi sosial keagamaan disetujui olehnya untuk menjadi partai politik. Hal ini membuktikan bahwa Syekh Sulaiman Ar-

Rasuli percaya, bahwa berjuang secara politis dan kepartaian diperlukan untuk menjaga sikap konsistennya memerdekakan republik dan anti terhadap penjajahan.

Keempat, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli juga berjasa dalam memberikan sumbang saran pemikiran dalam upaya mencari solusi terhadap persoalan perkembangan negara pasca revolusi. Beberapa solusi yang ditawarkan menyangkut soal kelayakan seorang menjadi pemimpin negara, penegakan keadilan, pemeratan pembangunan, sampai kepada perlunya masyarakat kembali menerapkan nilai-nilai adat dan syarak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkat suaranya dalam berbagai kesempatan, termasuk di media massa, maka ungkapan “adat bersyandi syarak, syarak bersandi kitabullah” menjadi populer dan masyhur sebagai identitas orang Minangkabau.

Kelima, sebagai ulama besar, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sepanjang hayatnya hadir sebagai pengayom ummat, dengan mengedepannya semangat persaudaraan dan perdamaian antara berbagai kelompok masyarakat bangsa. Berbagai pencerahan masyarakat telah dilakukan sejak masa kolonial, sebagai Qhadi, Ketua Mahkamah Syari’ah, anggota Konstituante, dan sebagainya. Hal ini membuktikan pengabdianya pada masyarakat dan bangsa tidak pernah berhenti, bahkan diusianya terbilang senja setelah pensiun dari Ketua Mahkamah Syari’ah Sumatera Tengah (1960), Syekh Sulaiman Ar-Rasuli tetap mengasuh pesantren Tarbiyah Islamiyah di daerah asalnya, Candung.

Keenam, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli meninggalkan warisan untuk kejayaan bangsa dengan karya tulisnya, baik berupa buku atau pun karangan yang diterbitkan media massa. Beberapa dari karya itu masih tersimpan dan terawat baik di pesantren Tarbiyah Islamiyah (Perti). Karya-karya itu, diantaranya *Dhiyaus Siraj fil Isra’ wal Mi’raj*, *Tsmaratul Ihsan fi wiladah Sayyidil Insan*, *Dawa-ul Qulub fi qishah Yusuf wa Ya’qub*, *Risalah al Aqwal al-Washitah fidz-Dzikri war-Rabithah*, *al-Qaulul Bayan fi Tafsiril Qur’an*, *Al-Jawahirul Kalamiyyah*, *Sabilus Salamah fi wird Sayyidil Ummah*, *Perdamaian Adat dan Syara’*, dan *Kisah Muhammad ‘Arif (tasawwuf)*. Secara ontologis tulisan-tulisan ini telah memberikan informasi bagi pencerahan ummat manusia dalam berbagai

bidang. Secara aksiologis berguna dalam memperterang makna filosofi tentang kehidupan zaman ke zaman. Secara epistemologis memberi pengetahuan tentang berbagai nilai dan ketajaman analisis menyangkut praktik agama dan kemasyarakatan.

Beberapa catatan itu, barulah sepinggal kecil dari jasa-jasa Syekh Sulaiman Ar-Rasuli yang terungkap dalam membimbing masyarakat, baik dalam kehidupan beragama maupun dalam perjuangan kemerdekaan tanah air serta mengisi kemerdekaan. Mengingat semua itu, sudah sepatutnya figur Syekh Sulaiman Ar-Rasuli menjadi suri-teladan generasi bangsa. Penghargaan terhadap peran dan jasanya perlu dipertimbangkan oleh berbagai pihak, khususnya pemerintah, untuk mengabdikan permohonan panitia seminar ini untuk menjadikan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mendapat anugerah gelar “pahlawan nasional”. Semoga!!!

DAFTAR PUSTAKA

- Aswiwarman Adam, “Pertimbangan Pahlawan nasional”, *Makalah*. Bukittinggi: Pemda Kabupaten Agam, 11-12 Maret 2016.
- Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia, 1900-1942*. Jakarta: LP3S, 1980.
- Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional, 1945-1965*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1987.
- Gusti Asnan, “Pahlawan Nasional, Diplomat, dan Bagindo Dahlan Abdoellah”, *Makalah*. Pariaman: 7 April 2016.
- Gusti Asnan, *Kamus Sejarah Minangkabau*. Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM), 2003.
- Hasril Chaniago, *101 Orang Minangkabau di Pentas Sejarah*. Padang: Yayasan Citra Budaya Indonesia, 2010.
- Hamka, *Ayahku Riwayat Hidup Dr. H. Abdul karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera*. Jakarta: Penerbit Umminda, 1982.
- Kahin, Audrey. *Perjuangan Kemerdekaan Sumatera Barat dalam Revolusi Nasional Indonesia 1945-1950*. Jakarta: Angsana Mamanda-MSI Sumatera Barat, 1997.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Kementrian Penerangan R.I., *Republik Indonesia Propinsi Sumatera Tengah*. Bukittinggi: Kementrian Penerangan R.I., 1954.

- M. Sanusi Latief (Eds.), *Riwayat Hidup dan Perjuangan 20 Ulama Besar Sumatera Barat*. Padang: Islamic Centre Sumatera Barat, 1981
- Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, “Mari Bersatu Dengan Adat dan Syarak”, dalam Gusti Asnan (Ed.), *Demokrasi, Otonomi dan Gerakan Daerah Pemikiran Politik Orang Minang Tahun 1950-an*. Padang: Yayasan Citra Budaya Indonesia, 2006.
- Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, “Gerakan Daerah Adalah Islah” dalam Gusti Asnan (Ed.), *Demokrasi, Otonomi dan Gerakan Daerah Pemikiran Politik Orang Minang Tahun 1950-an*. Padang: Yayasan Citra Budaya Indonesia, 2006.
- Taufik Abdullah, “Pahlawan dalam Perspektif Sejarah”, dalam *Majalah Prisma*. No. 7. Jakarta: 1976.
- Taufik Abdullah, “Mengenang Tiga Pendekar Bangsa”, *Makalah*. Padang: 21 Desember 2009.
- Yulizal Yunus, et.al., *Beberapa Ulama di Sumatera Barat*. Padang: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pariwisata Seni dan Budaya, UPTD Museum Adityawarman, 2008.

Padang, 3 Maret 2018

NP